



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BASUKI HARI SAKSONO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**
3. NHK : **92204**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.731.850.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/210 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.836.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 482 m2/155 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.735.200.000
3. Tanah Seluas 1855 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, WARISAN Rp. 3.246.250.000
4. Tanah Seluas 762 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 914.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 479.000.000

1. MOBIL, NISSAN CEDRIC SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA GENIO SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, VESPA SPRINT SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 282.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 44.786.296



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.538.136.296
III. HUTANG	Rp.	211.839.476
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.326.296.820

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.